LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

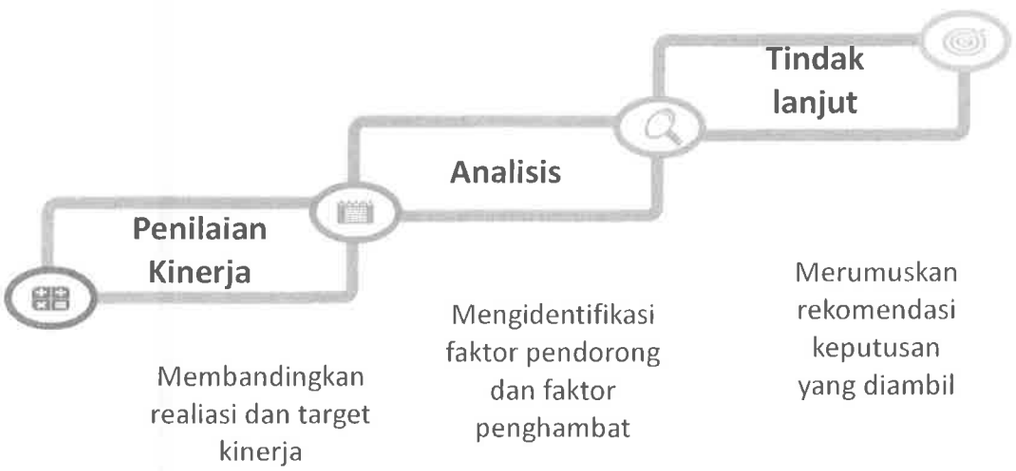
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.

2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

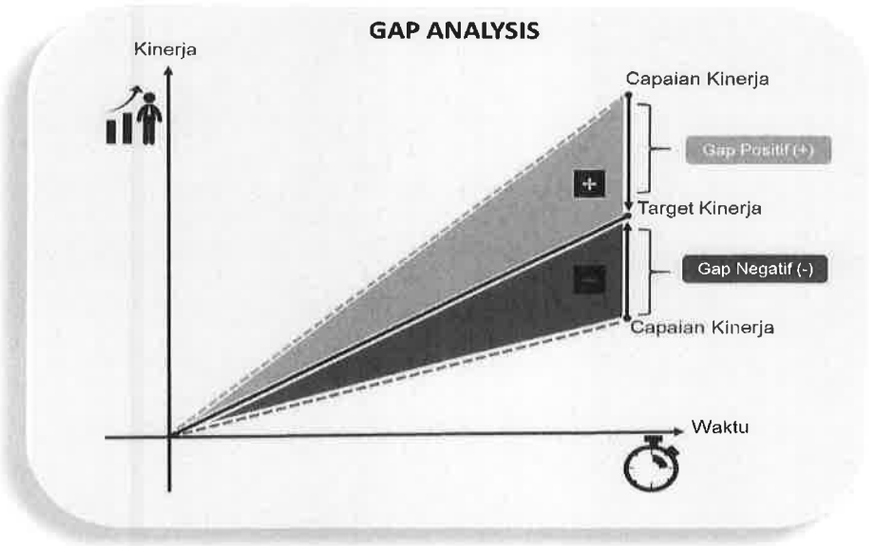
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja

berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



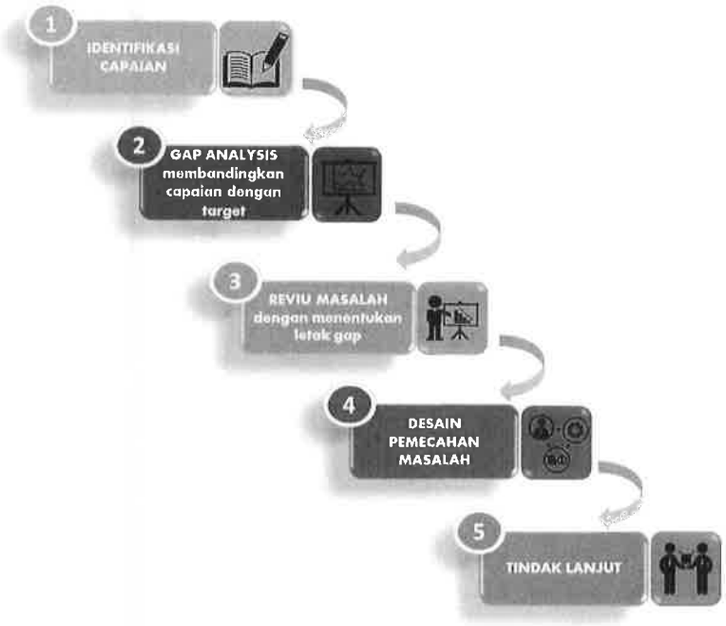
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagainya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Opini atas audit BPK	WTP	100 %	100 %
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standar	100 %	100%	100%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja sebesar 100 % atas tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk dikarenakan proses audit BPK telah diselesaikan yaitu pemenuhan dokumen yang diminta oleh BPK ;
2. Dalam pelaksanaan tujuan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standart baru mencapai 75 % pada tribulan III dan dikategorikan Tinggi.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**82**	**75%**	**87%**
1	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		**100%**	**85%**	**98%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	4	80%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	3	75%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	2	67%
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**100%**	**85%**	**80%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46	43	93%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akkhir tahun SKPD	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17	12	68%
3	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		**100%**	**50%**	**50%**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2	1	50%
4	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**75%**	**57%**	**76%**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60	0	0%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150	104	69%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150	69	40%
5	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**90%**	**57%**	**63%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1	3	300%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1	2	150%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1	3	300%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1	1	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3	1	33%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10	6	60%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	30	83%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200	100	50%
6	***Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah***		**80%**	**95,00%**	**118%**
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang di sediakan	10	8	80%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peraltan dan mesin lainnya yang di sediakan	10	11	110%
7	***Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah***		**90%**	**55%**	**61%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3	4	130%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	36	15	42%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12	9	77%
8	***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah***		**84%**	**70%**	**83%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinan	19	15	79%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	10	3	30%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara	10	9	90%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1	1	100%
B	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**100%**	**70%**	**70%**
1	***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***		**96%**	**68%**	**71%**
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	2	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2	1	50%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah perda APBD dan Perbup penjabaran APBD yang disusun	2	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perda perubahan APBD dan Perbup perubahan penjabaran APBD yang disusun	5	2	40%
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah yang dilaksanakan	0	0	0%
2	***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***		**100%**	**55%**	**55%**
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	9000	4572	51%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	208	192	92%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan adana transfer lainnya	92	51	55%
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keunagan bank dan lembaga keuangan bukan bank	1	1	100%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	650	449	69%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	5	7	140%
3	***Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah***		**100%**	**50%**	**50%**
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban	11	3	27%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran	4	3	75%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/Kota dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2	1	50%
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	150	50	30%
4	***Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah***		**80%**	**50%**	**63%**
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6	5	83%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	4	2	50%
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota	2	0	0%
5	***Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah***		**80%**	**10%**	**13%**
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	100	10	0%
C	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**100%**	**75%**	**75%**
1	***Pengelolaan Barang Milik Daerah***		**100%**	**75%**	**75%**

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	52	30	58%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan BMD	52	40	76%
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	1	0	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	52	36	69%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) BMD	52	15	29%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	4	3	75%
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah	30	25	87%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD barang milik daerah	26	7	40%

Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

1. Capaian Output Kegiatan pada Program Penunjang Kegiatan Pemerintahan Daerah tribulan III rata-rata 71%, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah Sangat Tinggi ;
2. Capaian Output Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah tribulan III rata-rata 70%, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah Tinggi;
3. Capaian output Sub Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah tribulan III rata-rata 75%, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah Tinggi Hal ini disebabkan pelaksanaan pekerjaan rata-rata pada tribulan III dan IV, sementara di tribulan sebelumnya masih dalam tahap persiapan.

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	Sinergitas seluruh stakeholder	-
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sinergitas seluruh stakeholder	-

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**	**Faktor Pendorong**	**Faktor Penghambat**
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Adanya ketentuan yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan SP2D dan lainnya kepada OPD sehingga pelayanan tepat waktu	OPD belum melengkapi permohononan sesuai ketentuan sehingga pelayanan SP2D dan lainnya tidak dapat segera ditindaklanjuti

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait		

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Laporan Tribulan III Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini memuat hasil evaluasi kegiatan Bulan Juli s.d. September Tahun 2025. Kebijakan Program maupun kegiatan yang dan dilaksanakan tersebut berpedoman dan bertujuan untuk wujudkan visi dan misi BPKAD Kabupaten Nganjuk. Program dan Kegiatan tersebut mengacu kepada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) BPKAD Kab. Nganjuk Tahun 2024 – 2026. Dalam realisasinya terdapat faktor pendorong dan penghambat. Untuk faktor pendorong akan dipertahankan sebagai dalam proses pencapaian kinerja tribulan berikutnya sedangkan faktor yang menghambat akan menjadi bahan evaluasi sehingga dapat direduksi pada tribulan berikutnya.

IV.2. Tindak Lanjut

Untuk lebih mengoptimalkan evaluasi strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

a. Menghimbau OPD untuk melakukan penelitian dokumen secara mandiri sebelum mengajukan permohonan SP2D dan dokumen lainnya;
b. Menjadikan hasil evaluasi kinerja tribulan berikutnya;
c. Tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku
d. Melakukan koordinasi dengan bidang – bidang untuk untuk mempercepat proses realisasi kegiatan

Nganjuk, 30 September 2025
Kepala BPKAD
Kabupaten Nganjuk



Dra. Dyah Puspita Rini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199202 2 001